

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan Hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Belanja Modal tahun anggaran 2014-2016 sudah berdasarkan dengan Program dan Kegiatan yang direncanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Kupang. Jika dalam pelaksanaan anggaran belanja modal masih terdapat Program dan Kegiatan yang belum terlaksana, hal itu disebabkan karena:

1. Belanja tanah yang disebabkan oleh masalah pembebasan lahan. Masalah pembebasan yang belum dimenangkan oleh Pemerintah Daerah Kota Kupang maka akan berpengaruh terhadap pembangunan yang sudah direncanakan. Sehingga akan mengalami penundaan pembangunan ketahun berikutnya.
2. Kendala teknis yang terjadi dalam pelaksanaan anggaran belanja modal untuk item belanja jalan irigasi dan jaringan karena tertundanya pembangunan pada tahun 2014 sehingga di tahun 2015 belum dapat terlaksana dan baru akan dilaksanakan di tahun 2016.
3. Pembangunan yang belum tuntas atau belum selesai dari tahun sebelumnya sehingga pelaksanaan untuk tahun tersebut tidak bisa dilaksanakan.
4. Penyelesaian Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja yang ada. Hal ini karena pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan terlambat menyelesaikan pembangunan.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan diatas, maka saran untuk Pemerintah Daerah Kota Kupang, sebagai berikut:

- 1.** Agar pemerintah daerah Kota Kupang lebih memperhatikan aset tetap yang dimilikinya agar tidak terjadi masalah dalam pelaksanaan anggaran belanja modal.
- 2.**Sebaiknya Pemerintah Daerah Kota Kupang lebih ketat dalam pengawasan pelaksanaan anggaran belanja modal agar tidak terjadi penundaan pembangunan dan keterlambatan penyelesaian pembangunan.
- 3.**Pemerintah Daerah Kota Kupang perlu memperhatikan pihak penyedia jasa perusahaan agar dapat melaksanakan anggaran belanja modal sesuai dengan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.
- 4.** Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Belanja Modal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukry. 2010. *Studi tentang Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan*
- Bastian, Indra. 2011. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Erlina dkk. 2015. *Akuntansi Keuangan daerah Berbasis Akrual*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta :Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi*, Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2001. *Defenisi Keuangan Daerah : “Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3”*. Jakarta :Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta:Salemba Empat.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (edisi kedua)*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2015. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo, 2005. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jurnal Analisis Kinerja keuangan APBD*.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah: Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 2 tentang *Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas*.
- Antara. “*Banyak Alasan Belanja Modal Kota Kupang Rendah*”. Diakses 15 Maret 2018. <https://kupang.antaranews.com>
- Rudianto. 2009. *Penganggaran*. Yogyakarta: Erlangga.

- Sitompul, Anisa. 2014. *Jurnal Pemerintahan Integratif*, Vol 2, No. 1, 2014:97-110.
- Syafitri, Lily.2012. *Analisis Implementasi Akuntansi Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Palembang*.
- Standar Akuntansi Pemerintah. 2012. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor71 Tahun 2010*. Bandung: Fokus media.
- Salim, Akbar Sanjani. 2014.*Analisis Evaluasi Investasi Pembangunan Perumahan Puri Manulai Indah Oleh koperasi Pegawai Negeri Maju Kota Kupang*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Pusatdan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Winarno,KurniawanIndra Guna. 2016. *Evaluasi Penerapan Akuntansi Belanja Modal Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010*.
- Yuwono, Sony dkk. 2008. *Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah)*. Malang : Bayumedia Publishing.